

RESISTENSI BURUH ANAK

Studi Resistensi Buruh Anak Dalam Hubungan Kerja Di Perkebunan Tembakau Ajung- Jember, Propinsi Jawa Timur

*Child Labour Resistance
(A Case study Of Child Labour Working Relation
in Tobacco Plantation Ajung – Jember, Province of East Java)*

Sudarso¹ dan Partini²

Program Studi Sosiologi
Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Generally, this research tries to indentify and analyze causes, forms, and impacts of child labour working relation in tobacco plantation. Specifically, this research has some certain point of goals. *First*, to explain more detail about the working condition and eksploitasi child labour in plantation sector. *Second*, to know and analyze the form of child labour resistance. That is hidden and open. *Third*, analyzing the impacts of hidden and open child labour resistance in the tobacco plantation.

This research conducted in Tobacco Plantation PTPN X, that situated in Ajung-Jember, East Java. This study interviewed 100 responden to give the illustration of child labour resistance. From 100 responden 15 of them were in depth interview to give qualitative data.

This important field finding in this research is the double marginalized condition of the child. Firstly, that condition was formed by the structural pressure of their supervisor (mandor and mbok). Secondly, they also have unequal relation with senior labour that subordinate them. This child labour resistance caused by the unfair treatment like cutting wage, accept anger was frequently, and sexual harrasment problem committed by the mandor, mbok and senior labour. This kind of resistance is one of safest solution to them to maintain their work in the plantation. This finding was proved by the fact that denoting almost all of the child labour can avoid the negative impact from this kind of resistance. In the other hand, the changing situation above is the main willingness of the child labour but still not responded by the plantation management.

Key word: *Child labour – Resistance – Marginalization.*

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta

PENGANTAR

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia akibat adanya krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 dan terus berlanjut hingga kini telah menyebabkan tingkat pendapatan penduduk menurun drastis – yang diikuti dengan terjadinya tingkat inflasi yang tinggi. Hal tersebut bukan saja menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sangat tajam yang ditunjukkan oleh meningkatnya penduduk miskin yang pada akhir tahun 1998 diperkirakan mencapai 49,5 juta jiwa atau bertambah sekitar 27 juta jika dibandingkan awal tahun 1996. Namun lebih dari itu dampak lanjutan yang kemudian timbul adalah semakin banyaknya jumlah pekerja anak, baik yang berusia 5-9 tahun atau 10-14 tahun.¹

Selain terjadi penambahan jumlah absolut pekerja anak, dan akibat lain yang ditimbulkan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan ini adalah: *Pertama*, krisis menyebabkan anak-anak yang semula dominan sebagai pekerja keluarga, sebagian di antaranya terpaksa keluar dari keluarganya dan bekerja sebagai buruh. Untuk anak yang berusia 10-14 tahun pada periode Agustus 1997 sampai dengan Desember 1998 terjadi penambahan 4 persen yang bekerja sebagai buruh, sedangkan untuk pekerja anak usia 15-19 tahun terjadi penambahan 1% pada periode yang sama. *Kedua*, krisis juga menyebabkan terjadinya penambahan jam kerja bagi pekerja anak. Jika pada tahun 1998 pekerja anak laki-laki usia 10-14 tahun yang bekerja lebih dari 25 jam sekitar 26 persen, maka pada tahun 1999 meningkat menjadi 27%. Untuk pekerja anak perempuan jika semula hanya 26 persen yang bekerja lebih dari 25 jam per minggu (1998), maka setelah krisis meningkat menjadi sekitar 27 persen. Sementara itu, untuk pekerja anak laki-laki usia 15-19 tahun yang bekerja lebih dari 25 jam per minggu, jika pada 1998 ada sekitar 63 persen, maka pada tahun 1999 meningkat menjadi 66 persen. Sedangkan pekerja anak perempuan di usia yang sama pada periode yang sama meningkat dari 58 persen menjadi 61 persen.²

Beberapa studi tentang pekerja anak yang dikaitkan dengan masa krisis tersebut, membuktikan bahwa pada masa krisis ekonomi acapkali muncul tindakan-tindakan yang merugikan anak., seperti kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja, gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Hasil kajian Irwanto³, misalnya menemukan sekitar 71,9% pekerja anak bekerja selama lebih dari 7 jam sehari. Pekerja anak yang menjadi pembantu rumah tangga dan mereka yang bekerja di jermal bahkan bekerja lebih dari 12 jam sehari.

Penelitian lain yang membuktikan adanya keadaan eksploitatif anak pernah ditemukan oleh Mustai'in dkk⁴, yang melakukan penelitian di Sampang, Probolinggo dan Bondowoso, di mana ada beberapa buruh anak yang bekerja selain jam kerjanya panjang sekitar 8-9 jam, juga berada di tempat yang sirkulasi udara tidak nyaman, serta menghirup bau yang menyengat yang berasal dari bahan baku dan beberapa zat kimia, misalnya tembakau dan rokok.

Beberapa contoh perlakuan diskriminasi dan keadaan marginal yang dialami oleh buruh anak di atas menunjukkan bahwa kondisi kerja dan kehidupan buruh anak sangat memprihatinkan. Dalam kenyataan sehari-hari kondisi yang dialami para buruh anak sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dengan kondisi buruh dewasa, tetapi posisi buruh anak lebih lemah dari pada buruh dewasa, semata-mata hanya karena status sosial mereka sebagai anak-anak. Berhadapan dengan buruh dewasa seringkali mereka berada dalam posisi yang ter subordinasi, karena sebagian besar buruh dewasa menganggap anak-anak sebagai saingan. Pelbagai bentuk subordinasi terhadap buruh anak dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari menyuruh anak-anak melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya sampai dengan membentuk kelompok untuk menyingkirkan buruh anak. Berhadapan dengan pengusaha, posisi anak-anak juga lebih lemah dibandingkan dengan buruh dewasa. Sebagai buruh, meskipun sudah ada aturan ketenagakerjaan, hak-hak mereka tak terjamin, apalagi bagi buruh anak hak-hak tersebut lebih tidak terjamin lagi. Meskipun ada peraturan -undang-undang dan peraturan menteri – yang mengatur cara memperkerjakan buruh anak, tetapi jelas sekali tak ada maknanya. Buruh anak-anak dipekerjakan dalam kondisi yang sangat rawan. Dalam penelitian Yusnaini⁵, juga mengungkapkan bahwa konflik kerja terjadi karena eksploitasi dan diskriminasi yang dilakukan oleh majikan atau pihak manajemen terhadap buruh anak.

Posisi buruh anak yang terjepit diantara dua kekuasaan – buruh dewasa dan pengusaha – tersebut harus memperjuangkan sendiri hak-haknya sebagai buruh. Ada beberapa lembaga swadaya masyarakat mencoba melakukan pemberdayaan pada buruh anak, yang berupa pendidikan, pengetahuan tentang hak-hak buruh, dan peningkatan kualitas hidup bagi buruh anak tersebut. Salah satu contoh LSM yang bergerak dalam pemberdayaan buruh anak di sektor perkebunan, yaitu Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM), mengungkapkan bahwa hasil pemberdayaan itu telah menghasilkan beberapa perubahan, misalnya, munculnya keberanian beberapa buruh anak untuk mempertanyakan nasib dan posisi mereka selama ini, dan munculnya solidaritas di antara para buruh.⁶

Umumnya penelitian tentang pekerja anak⁷ yang dilakukan sebelumnya, lebih banyak membahas soal eksploitasi, marginalisasi dan diskriminasi pekerja anak. Belum ada yang secara khusus mengkaji respon atau resistensi pekerja (buruh) anak dalam hubungan kerjanya. Oleh karena itulah studi tentang resistensi buruh anak di perkebunan menjadi amat penting untuk dikaji lebih dalam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena buruh anak yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa sangatlah tepat untuk mengamati keadaan posisi buruh anak dalam hubungan kerjanya yang cenderung telah mengalami perubahan tersebut, terutama persoalan munculnya keberanian buruh anak untuk mempertanyakan "posisi" dalam industri yang eksploitatif dan diskriminatif.

Untuk lebih memahami masalah buruh anak tersebut, maka dirumuskan masalah penelitiannya adalah: Mengapa buruh anak melakukan resistensi dalam hubungan kerjanya di perkebunan tembakau ? termasuk di dalamnya: (a) Sebab-sebab munculnya resistensi; (b) Bentuk-bentuk resistensi; dan (c) Akibat-akibat yang ditimbulkan dari resistensi buruh anak tersebut.

Kerangka teori

Sementara itu untuk mengamati masalah konflik perkebunan menggunakan pemikiran Dahrendorf, yang pernah mengutarakan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat industri sejak abad ke sembilan belas. Perubahan-perubahan itu ialah: (1) dekomposisi modal, (2) dekomposisi tenaga kerja, dan (3) timbulnya kelas menengah baru. Selanjutnya Dahrendorf menjelaskan bahwa kelas-kelas sosial tidak lagi berdasarkan atas pemilikan sarana-sarana produksi sebagaimana dinyatakan oleh Marx, tetapi ada dasar baru, yaitu mengacu pada hubungan-hubungan kekuasaan (*authority*) yang menyangkut bawahan dan atasan. Jadi perjuangan kelas yang dibahas Dahrendorf lebih merujuk pada kekuasaan daripada pemilikan sarana-sarana produksi. Dalam masyarakat industri modern pemilikan sarana produksi tidak sepenting dengan yang melaksanakan pengendalian atas sarana tersebut.⁸

Dari pemikiran diatas, nampaklah bahwa hubungan kerja di sektor perkebunan bisa dipahami dalam kerangka ada perbedaan kekuasaan (*authority*), dimana buruh-buruh anak— dalam posisi sebagai pihak yang tidak memegang kekuasaan berhadapan dengan pihak manajemen PTPN X yang punya kekuasaan mengatur dan mengelola segala aktivitas

di perkebunan tembakau tersebut.

Dalam kerangka berfikir untuk melihat hubungan kerja di perkebunan, peneliti juga menggunakan analisis Weber mengenai proses rasionalisasi. Tindakan sosial menurut Weber, dapat dibagi dalam empat tipe orientasi: 1) rasionalitas instrumental (Zwekrationalitat), 2) Rasionalitas Nilai (Wertrationalitat), 3) Afeksi-afeksi atau emosi-emosi, dan 4). Tradisi. Kemudian pemikiran dari Weber tersebut dikembangkan oleh Kalberg (1980) ke dalam klasifikasi empat tipe rasionalitas, yaitu praktis, teoritis, substantif dan rasionalitas formal.⁹

Penelitian resistensi buruh anak lebih menekankan pada tipe rasionalitas praktis, formal dan substantif. Penekanan penggunaan tipe rasionalitas ini dikarenakan dalam persoalan resistensi buruh anak saling terkait antara kepentingan buruh, perusahaan dan juga nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Buruh Anak dan marginalisasi

Teori transisi industrialisasi dari Rogers dan Standing¹⁰. Teori ini menjelaskan bahwa pada tahap awal industrialisasi dibutuhkan pemupukan modal untuk meningkatkan produksi atau teknologi. Untuk menekan biaya produksi, wanita atau anak-anak akan dipekerjakan, sebab hal ini akan menekan upah. Dikebanyak negara-negara sedang berkembang, secara kultural wanita dan anak-anak dipandang bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Mereka hanyalah membantu mencari nafkah kepala keluarga. Atas dasar pandangan inilah banyak pemilik modal memperkerjakan wanita dan anak-anak sebagai butuh di industrialisasi dengan upah rendah.

Teori segmentasi pasar yang dikemukakan oleh Doeringer dan Piore¹¹ membedakan jenis tenaga kerja atau pekerjaan atas: *Pertama*, pekerjaan-pekerjaan sektor primer yang secara relatif lebih baik di dalam hubungan dengan upah, jaminan keamanan, dan peluang untuk promosi. *Kedua*, pekerjaan-pekerjaan sektor sekunder yang memiliki upah yang rendah, jaminan keamanan yang kurang, dan peluang untuk promosi yang terbatas. Anak-anak yang bekerja sebagai buruh industri cenderung menempati posisi di sektor sekunder. Mereka menempati posisi tersebut karena status sosial mereka sebagai anak, adanya spesialisasi kerja yang tidak hanya didasarkan pada usia dan jenis kelamin, tetapi juga berdasarkan keahlian dan pendidikan. Akibat pendidikan yang rendah dan tidak adanya ketrampilan yang memadai menyebabkan buruh anak-anak berada dalam posisi ter subordinasi dan berada dalam

hirarkhi yang paling rendah (pekerja kasar). Meskipun jam kerja panjang dan kerja yang disamakan dengan tenaga dewasa, tetapi upah yang diterima lebih rendah daripada pekerja dewasa.

Penundukan buruh anak melalui hubungan kerja ini menunjukkan adanya dominasi kekuasaan dan wewenang dalam sistem produksi kapitalis. Menurut Dahrendorf¹² dalam setiap organisasi sosial sejumlah posisi tertentu berdasarkan peraturan hukum dipercayakan untuk mengendalikan posisi yang lain untuk menjamin penggunaan kekuasaan yang efektif. Asumsi bahwa perbedaan pembagian kekuasaan dan wewenang senantiasa menjadi faktor yang menentukan dari sejenis pertentangan sosial sistematis yang berhubungan erat dengan pertentangan kelas menurut pengertian tradisional (Marxian).

Resistensi Buruh

Para sosiolog industri secara umum sepakat bahwa konflik-konflik industrial memiliki manifestasi yang bervariasi. Konflik-konflik seperti misalnya: pemogokan, sabotase, restriksi *out-put*, non-kooperasi, dan lainnya dapat terjadi dalam basis individual maupun kolektif. Semua hal tersebut adalah konflik-konflik yang terbuka dalam hubungan industrial. Disisi lainnya ada konflik "terselubung" atau "tersembunyi" dan dikenal sebagai "konflik laten". Konflik laten biasanya muncul di mana terdapat kontrol organisasional kuat yang berusaha mendominasi atau mensubordinasi para buruh. Dalam kasus disfungsi organisasi-organisasi pekerja ditingkat pabrik serta kegagalan mereka untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan para buruh, konflik-konflik antara majikan dan para buruh memiliki tendensi untuk lebih terselubung daripada terbuka.¹³

Dahrendorf, mengungkapkan bahwa pada setiap asosiasi atau dalam konteks ini perusahaan akan selalu ditandai oleh pertentangan antara yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur tersebut. Kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasaannya, sementara kepentingan -kepentingan kelompok bawah (buruh) melahirkan ancaman bagi ideologi penguasa serta hubungan sosial yang terkandung didalamnya. Kepentingan yang dimaksud Dahrendorf, bisa bersifat manifes (disadari) dan kepentingan potensial (laten). Kepentingan laten lebih merujuk pada tingkah laku potensial yang telah ditentukan bagi seseorang karena menduduki peranan tertentu, tetapi masih belum disadari. Jadi kepentingan-kepentingan yang tidak disadari atau laten bisa muncul kepermukaan dalam bentuk tujuan-tujuan yang disadari, seperti persamaan gaji, persamaan kesempatan kerja. Dari sinilah

kemudian akan muncul kelompok-kelompok manifes yang sadar akan hak dan kewajibannya. Akhirnya Dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik itu akan selalu ada, karena ada perbedaan kekuasaan, dan usaha yang mencoba untuk menekan atau menghapuskan pertentangan tersebut adalah sia-sia.¹⁴

Menurut Coser¹⁵ ada dua konsekwensi dipendamnya konflik atau kepentingan yang berlawanan, *pertama*, dipendamnya konflik dapat mengakibatkan putusnya hubungan. Kalau keterlibatan emosional para anggotanya sudah tinggi, berakhirnya hubungan itu mungkin dipercepat dengan meledaknya konflik secara tiba-tiba dan parah, di mana ketegangan dan permusuhan yang menggunung sejak lama meledak dalam bentuk amukan yang keras. Konsekwensi *kedua* yang mungkin terjadi karena dipendamnya konflik adalah mengelakkan perasaan bermusuhan itu dari sumber yang sebenarnya, dan mengembangkan suatu saluran alternatif untuk mengungkapkannya. Alternatif seperti itu adalah sejenis katup pengaman dengan mana dorongan-dorongan agresif atau permusuhan dapat diungkapkan dengan cara-cara yang tidak mengancam atau merusakkan solidaritas.

Ada dua hal yang penting dilihat dari kehidupan buruh yaitu *survival* dan *gerakan*. *Survivalitas* adalah bagaimana mereka dapat bertahan hidup, sedangkan *gerakan* reaksi buruh adalah dari ketidakmampuan mereka dalam menghadapi realitas ekonomi. Dalam melihat gerakan sosial, terdapat dua bentuk yaitu *pertama* pola struktural dan kedua pola non struktural. Dalam pola struktural, resistensi yang dilakukan adalah terhadap pengusaha atau penguasa. Secara struktural, ada kelompok lain yang sifatnya menindas. Dalam hal ini, terdapat perbedaan kelas yang tajam seperti kelas buruh dengan pengusaha maupun budak dengan majikan.¹⁶

Dalam gerakan sosial, resistensi yang dilakukan beragam coraknya. Rajendra Singh menyebutkan bahwa gerakan sosial merupakan tindakan yang mendayu-dayu (*autopoietic*) yang diterapkan masyarakat pada dirinya sendiri untuk survival dan berkelanjutan. Namun dalam prakteknya, gerakan seperti ini berjalan dalam waktu yang panjang dan tidak membuahkan hasil dalam jangka pendek. Dalam mengkaji kelompok bawah (pinggiran) yang melahirkan gerakan sosial terdapat dua pola yaitu gerakan sosial yang berbentuk struktural dan gerakan sosial yang berbentuk non struktural. Dalam ungkapan lain, Singh menyebutkan bahwa dalam gerakan sosial ada bentuk gerakan sosial lama dan baru. Gerakan sosial yang lama bersifat menekankan unsur perbedaan kelas seperti petani buruh, sedangkan gerakan sosial baru yang menekankan pada resistensi tanpa kelas gerakan seperti gerakan

mahasiswa, gerakan lingkungan, dan lain-lainnya.¹⁷

Robert Gurr¹⁸ pernah mengungkapkan bahwa dasar gerakan sosial adalah *the basic frustration*, berarti gerakan sosial dimulai oleh rasa frustrasi atas keadaan yang menimpa diri seseorang atau sekelompok orang. Rasa frustrasi yang dimiliki oleh seseorang pada awalnya tidak menimbulkan reaksi apapun. Misalnya saja perwujudan dari sikap frustrasi, awalnya hanya diam saja atas berbagai persoalan yang ada di sekitarnya. Sikap diam seperti itu sudah merupakan bentuk yang paling dasar dari protes sosial dalam masyarakat. Seorang anak misalnya, ketika disuruh oleh orang tuanya, ia tidak mau atau diam saja. Sikap ini sudah merupakan pembangkangan paling awal terhadap kondisi yang ada dan sudah merupakan bentuk yang paling dasar dari gerakan sosial.

Sementara itu Scott¹⁹, mengatakan bahwa resistensi kelas itu memuat tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh kaum yang kalah, yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat kelas atas berhadapan dengan kaum yang kalah. Resistensi berfokus pada basis materi hubungan antar kelas dan pertarungan antar kelas; berlaku baik sebagai tindakan resistensi perorangan maupun resistensi kolektif, juga bentuk-bentuk resistensi ideologi yang menantang definisi situasi yang dominan dan menuntut berbagai standar keadilan dan kewajaran. Jadi resistensi berfokus pada maksud ketimbang pada konsekuensi, sehingga diakui bahwa banyak aksi resistensi mungkin gagal mencapai hasil yang dimaksud.

Ada sepasang bentuk resistensi, yaitu: *Pertama*, resistensi setiap hari, yaitu perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus antara kaum tani dan orang-orang yang berupaya untuk menarik tenaga kerja, makanan, pajak, dan keuntungan dari mereka. Umumnya bentuk resistensi ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. *Kedua*, pembangkangan langsung/terbuka.²⁰

Kedua bentuk resistensi ini sebenarnya sama-sama bertujuan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan oleh kelas yang dominan atau mengajukan klaim-klaim dalam menghadapi kelas-kelas yang lebih dominan. Klaim-klaim biasanya berhubungan dengan segi material dari pertarungan antar kelas—pemilikan tanah, tenaga kerja, pajak, dan lainnya. Perbedaan resistensi setiap hari yang paling mencolok apabila dibandingkan dengan resistensi lainnya adalah dalam hal penolakan yang implisit terhadap tujuan-tujuan publik dan simbolik. Apabila dunia perpolitikan yang terlembaga itu bersifat formal, terbuka, dan berkenaan dengan perubahan yang sistematis yang bersifat *de jure*, maka resistensi sehari-hari itu adalah informal, sering

tidak terbuka, dan pada umumnya hanya berkenaan dengan hasil-hasil langsung yang bersifat *de facto*.²¹

Dari penjelasan Scott di atas, bisa dikatakan bahwa keberhasilan resistensi *de facto* itu acapkali berkorelasi langsung dengan kepatuhan simbolis yang menjadi samarannya. Memberikan perlawanan secara terbuka dalam hampir semua keadaan akan memancing suatu respon yang lebih cepat dan lebih kejam ketimbang suatu ketidakpatuhan yang mungkin tidak demikian meluas, akan tetapi tidak pernah membantah definisi formal hierarki dan kekuasaan. Bagi kebanyakan kelas bawah, yang sudah pasti dalam sejarah nyatanya sedikit sekali prospeknya untuk memperbaiki status mereka, maka bentuk resistensi *de facto* inilah pilihan satu-satunya.

Selanjutnya Scott²², mengemukakan adanya perbedaan perspektif antara resistensi sungguh-sungguh di satu pihak dengan tanda-tanda kegiatan yang bersifat insidental dan aksi kecil-kecilan (terselubung) di pihak lain. Resistensi yang sesungguhnya bersifat: (a) terorganisasi, sistematis dan kooperatif; (b) berprinsip atau tanpa pamrih; (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner; (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Sedangkan yang bersifat kegiatan kecil-kecilan (terselubung), *insidental* dan, gejala kejahatan sekunder adalah: (a) Tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual; (b) bersifat untung-untungan dan berpamrih; (c) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner; (d) dalam maksud dan logikanya mengandung anti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada.

Meminjam istilah yang dipakai oleh Scott²³, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk resistensi sehari-hari dari kalangan buruh anak dalam bentuk resistensi terselubung muncul sebagai reaksi terhadap bentuk-bentuk tekanan sehari-hari yang dilakukan oleh pihak manajemen/pengusaha perkebunan. Tidak terjadinya resistensi terbuka bagi kaum yang lemah, miskin, atau dalam konteks ini adalah buruh anak, menurut Scott²⁴, karena adanya faktor-faktor penghalang munculnya resistensi terbuka, yaitu: *Pertama*, struktur sosial yang tidak kondusif. Seperti yang pernah diungkapkan dalam hasil penelitiannya di Sedaka, bahwa konflik terbuka tidak muncul, karena transformasi dalam lahan pertaniannya telah menghapus peranan kaum miskin dari proses produksi, sehingga kaum miskin semakin tersisih dan semakin sedikit pilihan dalam hubungan kerja dengan pemilik lahan. Jika keadaan ini dianalogikan dalam kehidupan buruh anak di perkebunan tembakau, nampak jelas bahwa berubahnya lahan pertanian, seperti semakin menyempitnya lahan, menyebabkan anak tidak tertampung lagi dalam struktur pertanian tradisional, sehingga mereka masuk dalam pekerjaan alternatif

lain yang hampir merupakan salah satu yang mungkin dilakukan untuk membantu ekonomi keluarga, yaitu di agroindustri tembakau tersebut. Karena pilihan yang tinggal satu-satunya tersebut, buruh anak semakin mudah tereksplotasi dan semakin tidak berdaya menghadapi hubungan kerjanya dengan penguasa perkebunan. Penghalang *kedua*, adalah kebutuhan *survival*. Pekerjaan yang ditekuni buruh anak tersebut harus dijalani bukan semata-mata untuk keperluan jajan mereka atau mengisi waktu luangnya, tetapi ada kebutuhan yang penting, yaitu dalam rangka mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya yang umumnya tergolong keluarga miskin. Jadi tidak ada jalan lain, kecuali mencari cara penyesuaian dengan lingkungan kerja, supaya biasa terus bertahan di perkebunan.

Jadi resistensi terselubung yang dilakukan buruh anak merupakan alternatif yang paling aman atau kalau meminjam istilah dari Scott²⁵, tindakan buruh anak ini adalah sebagai tindakan "dahulukan selamat" dan rasional supaya mereka tetap bisa bekerja sambil mengeluarkan ketidakpuasan pada pihak perusahaan perkebunan.

CARA PENELITIAN

Penelitian resistensi buruh anak ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai resistensi yang dilakukan buruh anak terutama disektor perkebunan tembakau. Penelitian buruh anak ini memilih daerah perkebunan tembakau PTPN X Ajung yang terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan alasan bahwa Kabupaten Jember – salah satunya PTPN X Ajung – merupakan daerah yang sebagian besar lahannya diperuntukkan untuk kegiatan di sektor perkebunan, dan perkebunan yang menjadi tonggak perekonomian kabupaten ini adalah perkebunan tembakau.

Dalam penelitian yang menjadi populasinya adalah buruh anak²⁶ yang bekerja di perkebunan tembakau²⁷, yaitu buruh anak yang bekerja di perkebunan PTPN X Kebun Ajung. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 buruh anak.

Data yang diperoleh dalam penelitian buruh anak perkebunan ini berasal dari dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan buruh anak dengan memakai kuesioner dan pedoman wawancara untuk *in depth interview* (wawancara mendalam). Dalam penelitian ini ada 15 buruh anak yang diwawancarai secara mendalam. Sementara data sekunder diperoleh dari pihak Perkebunan PTPN X, Laporan Penelitian, jurnal, artikel, Biro Pusat

Statistik (BPS) dan buletin yang diterbitkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu YPSM (Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat) yang berkecimpung dalam penanganan buruh anak di sektor perkebunan tembakau.

Pengumpulan data yang dilakukan, terutama data primer – wawancara – berkait dengan pengalaman resistensi yang dilakukan buruh anak, dibatasi pada masa setelah tahun 1997, yaitu pada masa yang lebih dikenal dengan masa reformasi. Pembatasan ini dilakukan untuk lebih bisa mendapat gambaran yang lebih dalam tentang proses resistensi, terutama mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan secara terbuka.

Dalam melakukan analisis dalam penelitian ini, ada dua tahap yang dilakukan, yaitu: *pertama*, data yang diperoleh dari wawancara yang menggunakan kuesioner, akan mendapatkan data yang lebih merupakan gambaran umum tentang resistensi. Dalam tahap ini lebih banyak menganalisis data-data kuantitatif, dalam bentuk interpretasi data dari tabel frekuensi, untuk mengetahui penyebaran data dan tabel silang yang melihat kecenderungan hubungan dan perbandingan antar dua variabel. *Kedua*, dari gambaran umum tersebut kemudian dilakukan pemilahan atau klasifikasi, dan diperoleh klasifikasi seperti kasus-kasus resistensi terbuka dan terselubung. Tahap kedua ini lebih banyak menganalisis data-data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Beberapa temuan pokok hasil penelitian yang memfokuskan pada resistensi buruh anak perkebunan tembakau adalah sebagai berikut.

Pertama, posisi buruh anak diperkebunan lebih banyak menjadi obyek dari sistem yang tercipta dalam sektor yang selalu menghasilkan devisa bagi negara tersebut. Buruh anak bukan hanya mengalami tekanan “struktural” dari mandor yang menjadi pengawas para buruh tersebut, tetapi juga dari mandor “bayangan” yang disebut *mbok (lokal)* ikut memperlancar tekanan struktural yang dialami buruh anak. Di sisi lain dalam kelompok buruh perkebunan, buruh anak tetap dalam posisi yang kalah dibandingkan buruh dewasa, yang senantiasa menganggap bahwa buruh anak hanya sebagai pelengkap dalam pekerjaan di sektor perkebunan tersebut. Ketidakberdayaan buruh anak tersebut dapat ditunjukkan mulai dari perlakuan para mandor dan *mbok* yang mencera dan memarahi anak-anak dengan kata-kata yang kotor, pemotongan upah, pemaksaan target perusahaan bahkan ada beberapa kasus melakukan pelecehan seksual, baik melalui perkataan maupun sentuhan fisik pada buruh anak perempuan. Perlakuan tersebut juga dilakukan

oleh buruh dewasa, terutama buruh dewasa yang berjenis kelamin laki-laki. Perlakuan dari mandor, mbok dan buruh senior tersebut memposisikan buruh anak dalam keadaan marginalisasi ganda.

Kedua, bentuk resistensi sehari-hari buruh anak yang peneliti temukan di perkebunan tembakau, cenderung menggunakan resistensi terselubung. Pola diam, tetapi melawan secara sembunyi dan *mengomel* menjadi pilihan yang sering menjadi rutinitas resistensi. Pola dari resistensi yang dilakukan buruh anak lebih merujuk pada posisi dari pihak yang menjadi lawannya, dalam konteks penelitian ini yang menjadi pihak lawan adalah mandor, *mbok* dan buruh senior.

Pada saat menghadapi mandor yang dalam struktur merupakan atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk memberhentikan buruh, tindakan yang dilakukan cenderung menggunakan pola diam, tetapi kemudian melakukan resistensi terselubung untuk kasus yang bisa mempengaruhi pendapatan buruh anak, seperti masalah target perusahaan, lembur dan pemotongan upah. Tetapi apabila masalahnya tidak berkait atau mempengaruhi pendapatan buruh, maka cara yang dilakukan adalah dengan *mengomel*. Keadaan ini berkebalikan dengan pola yang dilakukan jika menghadapi *mbok*, karena sebagian besar tindakan yang dilakukan buruh anak ketika bermasalah dengan *mbok* baik berkaitan dengan pekerjaan ataupun tidak, tindakan yang dilakukan cenderung *mengomel*, daripada diam, tetapi melawan. Sedangkan tindakan yang dilakukan buruh senior cenderung berimbang penggunaan antara tindakan *mengomel* dengan diam tetapi melawan.

Satu-satunya yang sebenarnya tidak terkait dengan pekerjaan di perkebunan tembakau, tetapi cukup sering dialami buruh anak, terutama buruh anak perempuan adalah pelecehan seksual. Resistensi yang dilakukan buruh anak menghadapi pelecehan seksual ini cenderung menggunakan cara *mengomel*, yaitu dilakukan pada mandor dan *mbok*. Resistensi dengan *mengomel* ini tergolong "berani" dan terpaksa dilakukan karena buruh anak merasa harga dirinya sudah terusik.

Ketiga, resistensi antara buruh anak perempuan dan laki-laki kecenderungan yang menunjukkan buruh anak laki-laki lebih berani dengan pola yang "terbuka" dalam melakukan resistensi dibanding dengan buruh perempuan. Namun terbukanyapun lebih pada ungkapan yang berupa kata-kata, seperti *mengomel*. Keadaan ini bisa dikaitkan dengan latar belakang lingkungan buruh anak yang berasal dari kalangan masyarakat Madura, di mana dalam lingkungan Madura yang menganut *patriarkhi*, selalu disosialisasikan pada anak-anaknya bahwa penjaga kehormatan keluarga adalah laki-laki (suami/bapak), oleh karena itu

sejak anak-anak, laki-laki dibentuk untuk lebih berani dibandingkan perempuan.

Keempat, munculnya resistensi yang dilakukan buruh anak sebagian besar merupakan hasil dari inisiatifnya sendiri dan didukung oleh adanya suasana reformasi atau era keterbukaan dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia setelah tahun 1997. Munculnya inisiatif sendiri tersebut terjadi karena buruh anak merasa diperlakukan tidak menyenangkan dalam hubungan kerjanya di perkebunan. Perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut acapkali berupa kemarahan, ucapan dan perilaku yang menyinggung perasaan buruh anak yang sebagian besar buruh perempuan tersebut. Keadaan ini juga didukung semakin melemahnya peran struktur *mediasi* dalam masyarakat, karena pihak perkebunan semakin rasional dan ekonomis dalam hubungan kerjanya.

Di sisi lain, jika dikaitkan dengan pemikiran Weber, yang kemudian dioperasionalkan oleh Kalberg²⁸, menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan buruh anak (resistensi) merupakan tindakan yang rasional yang cenderung mengarah pada tipe rasional praktis, artinya bahwa resistensi yang dilakukan tidak hendak merubah tatanan dalam struktur perkebunan, tetapi hanya semata-mata kepentingan praktis individu buruh agar mereka tetap bisa bekerja di perkebunan tembakau tersebut.

Namun, tidak semua masalah dalam hubungan kerja antara buruh anak dengan mandor, *mbok* dan buruh senior, bisa dikategorikan dalam tipe rasionalitas praktis, ada salah satu masalah yang bersangkutan paut dengan nilai "kepatutan" yang masih dibawa buruh anak dalam hubungan kerjanya di perkebunan, yaitu persoalan pelecehan seksual. Dalam masalah pelecehan seksual, menurut peneliti tidak bisa dilihat dari keempat tipe rasionalitasnya Weber (yang sudah dikembangkan oleh Kalberg), karena buruh anak melakukan tindakan dalam menghadapi masalah "harga diri" ini, sebenarnya bukan membawa kepentingan sebagai individu atau kelompok, tetapi membawa kepentingan "norma" dalam masyarakat madura, di mana setiap tindakan yang melukai "harga diri" harus dilawan, makanya diketemukan dalam penelitian ini, buruh anak lebih terbuka dan berani melawan, ketika timbul masalah pelecehan seksual.

Kelima, akibat yang diterima buruh anak, karena melakukan resistensi yang cenderung terselubung tersebut umumnya ditanggapi biasa saja oleh pihak yang pernah berkonflik dengan buruh anak, terutama mandor. Pilihan pada resistensi yang lebih banyak pada pola terselubung, bukannya datang secara kebetulan, tetapi merupakan pilihan yang rasional dan tepat, karena buruh anak tersebut ternyata secara langsung

maupun tidak langsung sadar bahwa posisinya dalam hubungan kerja di perkebunan tembakau tersebut selalu menjadi pihak yang kalah dan bawah. Ditambah lagi kondisi lingkungan, terutama kesempatan kerja di pedesaan yang bisa dikerjakan anak dalam rangka membantu orang tuanya mencari penghasilan itu semakin sedikit, karena lahan sedikit dan saingan tenaga kerja semakin banyak. Jadi mau tidak mau pekerjaan yang diraih sekarang, yaitu sebagai pekerja perkebunan harus dipertahankan agar tidak *dilorot* (pemutusan hubungan kerja).

KESIMPULAN

Diperkenalkannya model perkebunan tembakau pada masa penjajahan kolonial Belanda, jelas telah membawa dampak perubahan pada pengelolaan sektor pertanian yang semula dengan cara tradisional, beralih menjadi lebih modern yang lebih memperhitungkan pada rasionalitas dan keuntungan. Seperti pernah dikemukakan oleh Scott²⁹, bahwa adanya komersialisasi pertanian akan membawa pengaruh pada memburuknya "perimbangan pertukaran" (*balance of exchange*) antara pemilik dan penyewa/buruh, dan menimbulkan tata hubungan yang semula *patron-client* menjadi hubungan yang eksploitatif.

Temuan Scott tersebut, apabila dipergunakan dalam menganalisa munculnya perkebunan tembakau mulai masa kolonial Belanda sampai sekarang—yang sudah dikuasai negara—, nampak bahwa hubungan-hubungan dalam agroindustri tembakau, yaitu antara pengelola dan buruh masih berupa hubungan yang selalu tidak seimbang, dimana penguasa—pengelola perkebunan— selalu berada pada posisi yang selalu di atas..

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa jaman penjajahan sampai sekarang ternyata hampir tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pola hubungan produksi tersebut, malahan dalam beberapa kasus lebih parah keadaan eksploitasinya. Salah satu contoh kongkrit yang terjadi dalam penelitian pada buruh anak perkebunan ini, yang terungkap bahwa diskriminasi dan eksploitasi masih mewarnai dunia kerja para buruh anak tersebut. Buruh anak perkebunan mulai jaman kolonial Belanda, tidak jauh berbeda keadaannya dengan buruh anak pada jaman merdeka. Bahkan seolah-olah perkebunan yang cenderung diidentikkan dengan kapitalisme tersebut, masih mempertahankan budaya tradisional, yaitu adanya budaya patriarkhi, artinya laki-laki—yang memegang kuasa—selalu dominan dibanding perempuan—yang dikuasai.

Beberapa bukti yang bisa dikemukakan dari hasil analisis penelitian

ini, bahwa dalam struktur organisasi perkebunan tembakau masih cenderung seperti model patriarkhi, karena mayoritas masih di kuasai laki-laki -- mulai dari mandor sampai administrator -- sedangkan buruh yang jumlahnya mayoritas dan sebagian besar perempuan, berada dalam posisi dikuasai, meskipun kalau dilihat dari sisi jumlahnya lebih banyak.

Keadaan ini membuktikan bahwa tidak selamanya bahwa kapitalisme -- komersialisasi perkebunan -- yang diperkenalkan Belanda untuk mengusung perubahan menuju masyarakat yang lebih modern. ternyata cenderung ikut hanyut dalam budaya tradisional seperti patriarkhi tersebut. Menurut Hartman³⁰, ada interaksi antara patriarkhi dan kapitalisme. Patriarkhi yang lebih dulu ada, sukar ditaklukkan oleh kapitalisme, malah masih cenderung kuat. Patriarkhi menciptakan bentuk kapitalisme modern, sebagaimana perkembangan kapitalisme telah menyebarkan institusi-institusi patriarkhi. Akomodasi bersama antara sistem patriarkhi dan kapitalisme menciptakan lingkaran setan bagi perempuan.

Lebih menarik lagi penelitian buruh anak perkebunan tembakau ini juga membuktikan bahwa model tradisional, kolonial dan jaman kapitalis berkuasa, ternyata posisi buruh anak tidak mengalami perubahan yang signifikan, malahan dalam kasus-kasus tertentu lebih eksploitatif, artinya pekerja anak mulai jaman masyarakat yang masih tradisional sampai jaman agroindustri yang ditawarkan oleh Belanda tersebut dalam posisi yang mengalami tekanan struktural dari pihak yang menguasai perkebunan -- yang dalam konteks penelitian ini ditunjukkan oleh perlakuan mandor -- dan juga selalu menjadi korban dalam hubungannya dengan buruh yang lebih dewasa. Jadi buruh anak perkebunan tembakau merupakan gambaran yang sebenarnya dari keadaan marginal ganda (*double marginal*).

Sementara itu dalam sisi resistensi, ada beberapa kajian resistensi sebelumnya, yang cenderung melihatnya dalam dua perspektif yang dikotomis. *Pertama*, perspektif yang termasuk dalam pendekatan strukturalisme dan fungsionalisme yang cenderung terlalu menekankan pada faktor-faktor deterministik dan upaya pengukuran yang semata-mata bertujuan untuk melahirkan obyektivitas, dan agak mengabaikan otoritas individu yang memiliki kebebasan berpikir dan bertindak sesuai dengan kebutuhannya sendiri. *Kedua*, pendekatan fenomenologi dan hermeneutik yang sering kali terlalu menghargai subyektifitas dan gagasan-gagasan tindakan manusia yang *voluntaristik*, dan dalam banyak hal mengabaikan keterbatasan ruang gerak individu dalam bersikap.

Sikap yang mencoba memaksakan diri untuk menjelaskan aksi resistensi buruh anak – yang merupakan kaum lemah, secara deterministik, selain cenderung mereduksi salah satu elemen penting resistensi tersebut, juga menyebabkan penjelasan menjadi terkesan mekanistik. Sementara itu, keinginan untuk menjelaskan tindakan resistensi buruh anak semata dari perspektif fenomenologi, selain hanya akan melahirkan penjelasan yang parsial, juga akan menyebabkan analisis terjebak pada penjelasan yang bersifat *ideologik*.

Dalam sisi fenomena resistensi yang terselubung inilah pendekatan fenomenologi³¹ mampu mengisi analisis yang lebih obyektif dibandingkan dengan struktural konflik yang masih makro, karena fenomenologi lebih memahami dan mendalam persoalan pengalaman sehari-hari tentang kesadaran, ide dan tindakan yang dilakukannya pada waktu melakukan hubungan kerjanya dengan mandor, *mbok* dan buruh senior di perkebunan

Penelitian resistensi buruh anak ini mengingatkan pada semua orang bahwa dalam memahami aksi resistensi kelompok atau masyarakat kelas bawah – termasuk buruh anak – dibutuhkan suatu proses dialektika – yang mencoba memadukan dan menjembatani kekakuan struktur dan otoritas individu dalam bertindak agar saling berkaitan satu dengan yang lain dalam menciptakan zone-zone sosial bagi kelompok atau masyarakat kelas bawah. Seperti yang pernah dijelaskan dalam studi ini, bahwa resistensi yang dilakukan buruh anak dalam menghadapi kuatnya hegemoni perkebunan tembakau, yang berideologikan nilai-nilai feodalistik dan kapitalistik tersebut, ternyata tetap memiliki kekenyalan strategi atau cara yang dilakukan dengan konsep ideologinya sendiri, dan terus dipertahankan serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari di perkebunan tembakau.

Akhirnya, penelitian yang lebih cenderung menggambarkan proses resistensi yang dilakukan buruh anak perkebunan ini, mempertegas dan membuka alternatif pemikiran baru beberapa kajian buruh anak yang pernah dilakukan, bahwa buruh anak dalam menghadapi situasi hubungan kerjanya yang cenderung diskriminatif dan marginal tersebut, ternyata ada benih-benih resistensi yang muncul untuk memberikan “perlawanan” pada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan yang diterima setiap harinya, meskipun resistensinya masih dilakukan secara tersembunyi atau terselubung.

CATATAN KAKI

¹ *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*, 1999, Biro Pusat Statistik

² *Ibid*

³ Irwanto dan tim, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*, Kerjasama UNICEF dan Unika Atmajaya, Jakarta, 1995, hal.66 dan *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia Analisis Situasi*, Unika Atmajaya, Depsos dan UNICEF, Jakarta, 1999, hal 81-82.

⁴ Musta'in, dan tim, *Eksplorasi dan Bahaya Mengancam Pekerja Anak, Studi Kualitatif Tentang Pekerja Anak di Sektor Berbahaya di Jawa Timur*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2001.

⁵ Yusnaini, *Posisi Buruh Anak di Sektor Industri, Studi Pola Hubungan Kerja Antara Buruh Anak dan Majikan Pada Pabrik Garmen PT.RS Di Kodya Surakarta*, Tesis, UGM, Yogyakarta, 2001, hal.82

⁶ Lihat lebih jauh pada "Menuju Pemberdayaan Buruh Anak Di Warengan dan Gudang Tembakau, dalam Mulandar, Surya (ed.) *Anak Marjinal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, Yayasan Akatiga, 1996, hal 23-25

⁷ Beberapa penelitian anak oleh: Irwanto, loc.cit, Musta'in M, loc.cit, Suyanto, loc.cit., Yayasan Akatiga dan lain-lainnya.

⁸ Lihat Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (1987), Rajawali Pers, Jakarta, halaman 132-135

⁹ Lihat Susetiawan, *Konflik Sosial*, (2000), Pustaka Pelajar, Yogya, hal. 33-38, dan Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosilogi*, Jilid I (1986), Gramedia, Jakarta, hal. 219-225.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Lihat Giddens, Anthony dan Held, David, *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hal 289-290

¹² Lihat Dahrendorf, Ralf, *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hal. 201.

¹³ Susetiawan, *Konflik Sosial, Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 216-217

¹⁴ Poloma, *Op.Cit*. hal. 136-139

¹⁵ Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi, Klasik dan Modern*, Jilid II, Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 201.

¹⁶ Lihat di Zubir, Zaiyardam, *Radikalisme Kaum Pinggiran*, (2002), Insist Press, Yoyakarta, hal 36

¹⁷ *Ibid*, hal.38-39

¹⁸ *Ibid* hal 40

¹⁹ Scott, James C. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah Bentuk-bentuk Resistensi Sehari-hari Kaum Tani*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 382

²⁰ Scott, *Ibid*, hal 40-43

²¹ *Ibid*, 44-45

²² Scott, James C., *Op.cit*, hal. 385-386

²³ *Ibid*, dalam buku yang berisi tentang penelitian di Sedaka, Malaysia tersebut, Scott, menjelaskan tentang resistensi sehari-hari petani secara terselubung sebagai reaksi atas tekanan yang dilakukan tuan tanah.

²⁴ *Ibid*, hal. 321-329

²⁵ Lihat lebih jauh di Scott, Moral Ekonomi Petani, 1988, LP3ES, Jakarta, hal. 23-39

²⁶ Berdasarkan konvensi ILO No.128, yang disebut pekerja (buruh) anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dan tambahan untuk penelitian ini orang tersebut belum kawin.

²⁷ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Yayasan Prakarsa Swadaya Mandiri (YPSM) Jember, LSM yang bergerak dalam pendampingan buruh anak perkebunan tembakau, ternyata tidak mempunyai catatan yang pasti jumlah keseluruhan buruh anak di kecamatan Ajung. Catatan yang ada dan terserip adalah buruh anak yang mengikuti pendampingan yang jumlahnya tiap tahun berubah-ubah antara 20 sampai 40 buruh anak di satu desa. Di luar pendampingan tersebut, menurut pengamatan LSM tersebut, buruh anaknya masih cukup banyak. Satu-satunya informasi tentang jumlah buruh anak di perkebunan tembakau di dapat dari hasil penelitian *Akatiga dan YPSM*, yang pernah meneliti tentang pendampingan buruh anak di dua kecamatan Rambipuji dan Ajung dengan mencatat sejumlah 200-an buruh anak perkebunan tembakau.

²⁸ Lihat Susetiawan, *Loc.cit*, dan Johnson, *Loc.cit*.

²⁹ Lebih rincinya lihat Scott, *Op. Cit*. Hal.101-103

³⁰ Lihat dalm Giddens, Anthony dan Held, David, *Op. Cit*. Hal. 505-508

³¹ Lihat Craib, Ian, *Ibid*, hal. 126-128